

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 4 Tahun 2025

Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan melalui Kolaborasi Kelembagaan Multipihak

Penulis

Suprehatin Suprehatin¹, Rizha Nur Irawan^{2, 3}, Tsurayya Syifa'Azmira³, Senia Aprilia Putri Hasibuan³,
Mahda Aryo Firdaus³

¹ Departemen Agribisnis, IPB University

² Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Pertanian, Sekolah Vokasi, IPB University

³ Tim Ekspedisi Patriot 2025

Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan melalui Kolaborasi Kelembagaan Multipihak

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari transformasi transmigrasi, namun akselerasi terhambat oleh fragmentasi kelembagaan seperti gagalnya koperasi dan BUMDes berfungsi sebagai *aggregator* pasar dan pengelola alur modal.
- 2) Akselerasi transformasi terhambat oleh lemahnya sinergi hulu-hilir akibat minimnya fasilitas pascapanen terintegrasi dan ketiadaan kemitraan kontrak dengan *offtaker*, yang memaksa petani terjebak pada penjualan bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
- 3) Pembentukan lembaga ekonomi kawasan menjadi kunci utama sebagai *hub* terpusat untuk efisiensi pengadaan input, konsolidasi hasil produksi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.
- 4) Akselerasi kawasan memerlukan wirausaha sosial (*social entrepreneur*) sebagai penggerak *hub* yang mampu menjembatani keterbatasan kapasitas petani dengan standar pasar, sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi tetap terdistribusi secara inklusif di dalam kawasan transmigrasi.
- 5) Kolaborasi kelembagaan multipihak harus diimplementasikan secara terintegrasi untuk menyinergikan masyarakat (pelaksana), pemerintah (regulator/fasilitator), akademisi (inovasi teknologi/ kapasitas SDM), bisnis (investasi/akses pasar), dan media (promosi/transparansi).

Ringkasan

Transformasi Transmigrasi menghadapi kendala fragmentasi kelembagaan ekonomi dan ketiadaan *hub* koordinasi di tingkat tapak kawasan. Kerja kelembagaan secara parsial dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menghambat sinergi multisektor dan pencapaian skala ekonomi komoditas unggulan. Tulisan ini merekomendasikan kebijakan tatakelola kelembagaan yang terfokus untuk mengakselerasi pembangunan kawasan transmigrasi. Solusi kunci yang diusulkan adalah pembentukan lembaga ekonomi kawasan (*single hub*) yang digerakkan wirausaha sosial (*social entrepreneur*) dan pendamping profesional dalam ekosistem kolaborasi multipihak (Pentahelix). Strategi ini akan mengefisiensi rantai nilai dan mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi dalam rantai pasok industri, inklusif bagi petani kecil dan pemuda, serta berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya berbasis nilai tambah.

Kata kunci: kawasan transmigrasi, kolaborasi kelembagaan, komoditas unggulan, rantai nilai

Pendahuluan

Pemerintah saat ini sedang mengakselerasi pencapaian visi pembangunan nasional melalui Transformasi Transmigrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Permentrans No. 8 Tahun 2025 (Permentrans 8/2025). Transformasi ini bertujuan utama pada peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Mengacu pada Permentrans tersebut, sebagai kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem, pembangunan kawasan transmigrasi harus berdasar pada sembilan asas penyelenggaraan, di mana asas berintegritas, berdampak, kolaboratif, dan berkelanjutan menjadi landasan esensial. Selain itu, keselarasan pembangunan kawasan transmigrasi dengan program unggulan nasional menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, secara historis sampai sekarang pembangunan kawasan transmigrasi secara umum menghadapi tantangan struktural yang menghambat akselerasi pembangunan (Arndt 1983; Adji *et al.* 2021; Pérez-Sainz 2022). Tantangan multidimensi ini melingkupi isu kepastian hukum hak atas tanah dan lahan, keterbatasan sarana prasarana, kapasitas SDM, hingga permasalahan krusial pada aspek tatakelola pembangunan kawasan (Arndt 1983; Pratiwi *et al.* 2022; Sudarsono *et al.* 2023; Tirtosudarmo 2022). Hal ini mencakup fragmentasi kelembagaan ekonomi lokal (seperti Poktan, BUMDes, Koperasi) dan lemahnya sinergi antar multipihak, serta ketiadaan lembaga pengelola yang terlegitimasi di tingkat tapak kawasan (*hub*).

Permasalahan tata kelola ini berakar pada ketiadaan lembaga ekonomi yang terlegitimasi sebagai *hub* di tingkat tapak. Kondisi tersebut menciptakan *gap* dalam efektivitas pembangunan kawasan. Sejauh ini, pemerintah telah berhasil

menyalurkan berbagai bantuan input pertanian untuk pengembangan komoditas unggulan melalui lembaga lokal seperti Poktan dan BUMDes. Namun, intervensi ini gagal mengatasi masalah mendasar karena tata kelola yang bersifat parsial. Ketiadaan *hub* dan rendahnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan penyaluran bantuan tersebut menjadi tidak efisien dan terfragmentasi. Akibatnya, kawasan tetap gagal mencapai skala ekonomi, stabilitas ekonomi lokal terus terancam, dan akselerasi pembangunan secara keseluruhan menjadi terhambat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang terlegitimasi dengan pembentukan *hub* kawasan dan memprioritaskan kolaborasi kelembagaan multipihak yang efektif (Higham *et al.* 2024; Maryono *et al.* 2024). Kolaborasi multipihak merupakan hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik publik maupun nonpublik, di mana semua partisipan sepakat untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama (United Nations 2015). Pendekatan ini selaras dengan tiga program unggulan transformasi transmigrasi yaitu sinergi multisektor, peningkatan SDM unggul, dan hilirisasi komoditas unggulan. Lebih lanjut, pendekatan kolaborasi multipihak ini juga dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (Eweje *et al.* 2021; Higham *et al.* 2024; United Nations 2015).

Tulisan ini bertujuan untuk merekomendasikan strategi kolaborasi kelembagaan multipihak sebagai kerangka kerja nyata untuk mengakselerasi pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam arti, strategi kolaborasi multipihak ini dapat berperan dalam pengembangan rantai nilai komoditas unggulan dan transformasi kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru (*epicentrum of growth*) yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Landasan Kebijakan: Lima Program Unggulan Transformasi Transmigrasi

Transformasi Transmigrasi yang diamanatkan dalam Permentrans 8/2025 diselenggarakan melalui lima Program Unggulan sebagai kerangka kerja strategis untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT). Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan, penguatan, dan akselerasi pembangunan, sekaligus menyelesaikan isu-isu mendasar yang menjadi penghambat utama. Dua program pertama menjadi fondasi penyelesaian isu dasar yaitu (1) Trans Tuntas berfokus pada penjaminan kepastian hukum atas tanah dan lahan, dan (2) Trans Lokal berfokus pada pembangunan manusia dan pemberdayaan transmigran lokal sebagai motor penggerak pembangunan kawasan.

Selanjutnya, dua program didedikasikan untuk akselerasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Pertama, Trans Patriot bertujuan pada peningkatan keberadaan dan peran SDM unggul yang memiliki kualitas sesuai kebutuhan pembangunan kawasan, khususnya melalui riset dan pendampingan sebagai akselerator pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, puncak dari upaya ekonomi adalah Trans Karya Nusa, yang diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal serta sektor jasa unggulan, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur industri dan kolaborasi dengan badan usaha.

Program kelima, Trans Gotong Royong, adalah landasan kunci untuk strategi kolaborasi dalam pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini secara eksplisit diselenggarakan untuk mendorong kerja sama partisipatif berbasis kesetaraan yang inklusif secara multisektoral. Program ini bertujuan untuk mewujudkan

penyelenggaraan transmigrasi yang terintegrasi, melaksanakan koordinasi dan integrasi multisektor secara intensif, serta mengelola risiko secara sistematis. Dengan adanya kerangka Trans Gotong Royong, kebutuhan akan kolaborasi kelembagaan multipihak memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, seperti yang akan diuraikan dalam bab berikutnya, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh fragmentasi kelembagaan di tingkat tapak dan ketiadaan kerangka kelembagaan yang sistematis, yang menjadi fokus utama dari rekomendasi kebijakan ini untuk mendukung akselerasi.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi: Kesenjangan Implementasi

Meskipun Permentrans 8/2025 telah menyediakan kerangka kebijakan yang kuat, terutama melalui program Trans Gotong Royong yang mengamanatkan sinergi multisektoral, tantangan terbesar saat ini bergeser pada isu implementasi struktural di tingkat tapak kawasan. Secara konseptual, program pemerintah telah mengarah pada kolaborasi, namun secara praktis, upaya akselerasi pembangunan terhambat oleh disparitas kelembagaan dan ketiadaan mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan program unggulan tersebut.

Sebagai konsekuensinya, terdapat kesenjangan implementasi pembangunan kawasan transmigrasi, terutama pada program Trans Gotong Royong. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Program Unggulan Trans Gotong Royong dari Permentrans 8/2025 secara eksplisit menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan Transmigrasi yang terintegrasi dan mendorong kerja sama partisipatif multisektoral.

Namun, temuan empiris Ekspedisi Patriot 2025¹ di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,

¹ Ekspedisi Patriot salah satu program unggulan Kementerian Transmigrasi untuk memetakan potensi wilayah dan ekonomi di 154 Kawasan Transmigrasi di seluruh Indonesia selama empat bulan sampai Desember 2025. Program ini melibatkan

lebih dari 2000 mahasiswa, alumni dan dosen dari tujuh perguruan tinggi yaitu IPB University, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro dan Institut Teknologi

menunjukkan kesenjangan signifikan antara kerangka kebijakan ideal dan realitas lapangan. Masalah utama terletak pada fragmentasi kelembagaan ekonomi lokal, mulai dari BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kelompok tani (Poktan), hingga Poktan dan Gapoktan. Meskipun setiap desa dari total 23 desa di kawasan tersebut telah memiliki Poktan atau BUMDes, kinerjanya masih bersifat parsial dan tidak terkoordinasi. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kinerja komoditas unggulan. Sebagai contoh, produktivitas jagung pada tahun 2024 hanya mencapai rata-rata 3,5 ton/ha. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata produktivitas nasional tahun 2024 yang mencapai 5,9 ton/ha (BPS 2025). Padahal, kawasan ini memiliki potensi luas tanam yang besar mencapai 10,3 ribu ha dengan total produksi 36,4 ribu ton.

Tanpa koordinasi yang efektif ini, masalah mendasar seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas SDM, dan inefisiensi pengadaan sarana produksi pertanian (saprotan) akan terus berulang. Dalam konteks kebijakan nasional, pengembangan kawasan transmigrasi harus sejalan dengan upaya hilirisasi komoditas. Namun, fragmentasi di tingkat akar rumput (desa) membuat program pemerintah pusat untuk penguatan rantai nilai menjadi sulit diimplementasikan, karena tidak ada *hub* yang mewadahi seluruh hasil produksi desa. Lebih lanjut, inefisiensi yang terus berlanjut ini akan dapat menghambat upaya Trans Patriot dalam peningkatan SDM dan Trans Karya Nusa dalam mewujudkan hilirisasi komoditas unggulan.

Rekomendasi Kebijakan: Model Kolaborasi Kelembagaan Multipihak

Berdasarkan kesenjangan implementasi pembangunan kawasan transmigrasi di atas, maka dirumuskan strategi kelembagaan, dimulai dari pembentukan *hub* kawasan hingga implementasi model kolaborasi multipihak, sebagai solusi konkret untuk mengakselerasi pembangunan dan mentransformasi kawasan transmigrasi.

Sepuluh November serta beberapa perguruan tinggi mitra di daerah.

1. Pembentukan *Hub* Kawasan: Kelembagaan Pengelola Tapak sebagai Motor Akselerator

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan akselerasi pembangunan yang efektif, diperlukan perubahan struktural pada tatakelola di tingkat tapak kawasan. Solusi mendesak adalah pembentukan Kelembagaan Pengelola Tapak Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai *single hub*. Mengacu pada Permentrans No. 8/2025, pembentukan lembaga pengelola kawasan, termasuk lembaga ekonominya, perlu dilakukan berdasarkan kajian mendalam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, lembaga ekonomi tersebut dapat diimplementasikan melalui BUMDes Bersama, koperasi sekunder, atau bentuk lembaga lain, yang pembentukannya harus didasarkan pada prinsip konsensus, keterpaduan dan keberlanjutan guna menghindari konflik kepentingan di masa mendatang.

Fungsi utama kelembagaan di tapak kawasan ini adalah memperbesar skop dan skala ekonomi lokal dengan mengkoordinasikan seluruh unit bisnis desa. Lembaga ekonomi kawasan menjadi langkah diskontinuitas kebijakan yang diperlukan untuk melompat dari sistem parsial ke sistem terpadu sebagai suatu prasyarat untuk akselerasi. Hal ini karena kelembagaan ini memfokuskan pada pengembangan kelembagaan produksi, aktivitas ekonomi bernilai tambah, serta peningkatan kapasitas dan jejaring. Kelembagaan ini juga wajib menangani pelaksanaan dan mengkoordinasikan multipihak pada tingkat kawasan, sekaligus menjamin keberlangsungan kawasan secara utuh.

2. Menumbuhkan Peran Kunci Penggerak Kawasan yaitu *Social Entrepreneurs* dan Pendamping Kawasan

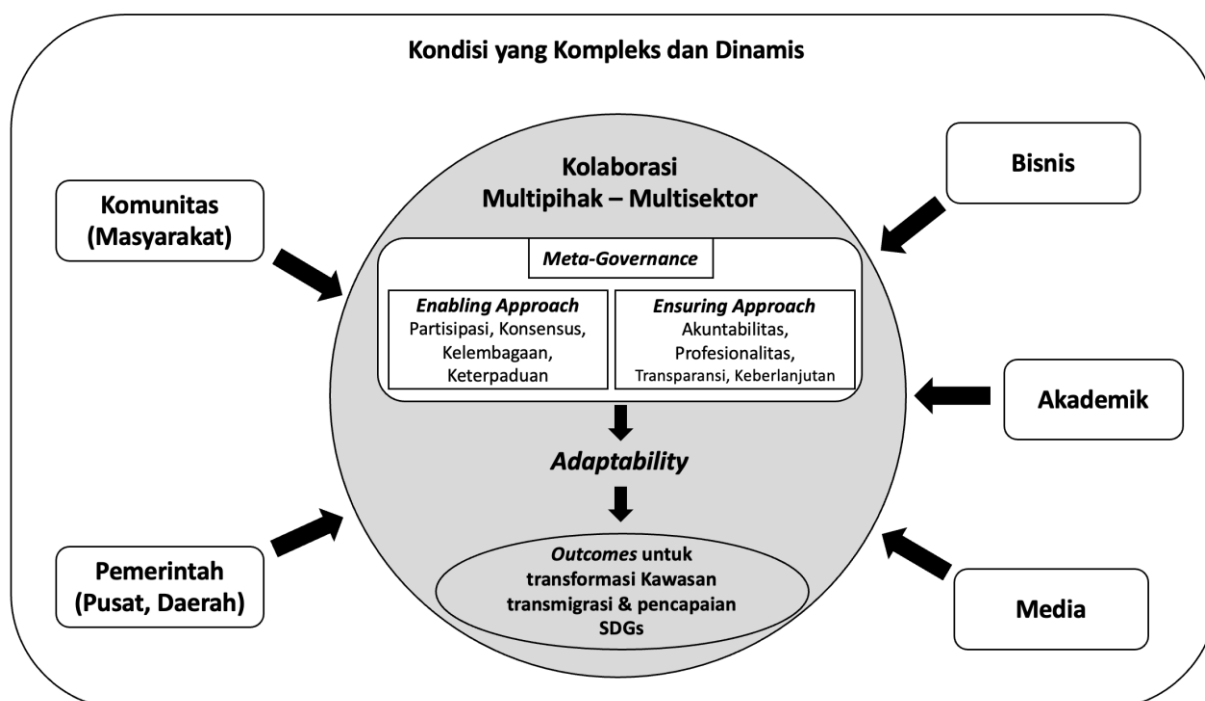
Akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi menuntut kehadiran pemimpin transformatif melalui sinergi antara wirausaha sosial (*social entrepreneur*) dan pendamping kawasan profesional. Wirausaha sosial menjadi penggerak *hub* kawasan karena kemampuannya

menciptakan inovasi organisasi dan keberanian mengambil risiko untuk memecahkan masalah kemasyarakatan yang tidak terjangkau mekanisme tradisional. Peran ini diperkuat oleh pendamping kawasan (semangat Trans Patriot) yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM kelembagaan, pengembangan jejaring kemitraan, dan sinkronisasi usaha ekonomi lokal. Agar mekanisme ini efektif, terdapat tiga elemen prasyarat yang harus dipenuhi yaitu legalitas yang menjamin entitas *hub* dapat melakukan kontrak bisnis secara sah, struktur organisasi yang memisahkan fungsi pengawasan oleh anggota dan manajemen operasional oleh profesional, serta kapasitas SDM minimal dalam bisnis dan manajemen rantai pasok serta literasi digital.

3. Mewujudkan Sinergi Kolaborasi Multipihak

Integrasi kelembagaan baru yang digerakkan oleh *social entrepreneurs* dan lembaga kawasan diwadahi oleh kerangka kerja yang utuh, yaitu model kolaborasi penta-helix yang efektif dan

terlegitimasi (Gambar 1). Kerangka kerja yang menterjemahkan semangat Trans Gotong Royong ini menjadi keseimbangan antara pendekatan memfasilitasi (*enabling approach*) dan pendekatan menjamin (*ensuring approach*). Pendekatan memfasilitasi berfokus pada pemberdayaan struktural komunitas yaitu pemerintah menyediakan kerangka hukum lembaga kawasan dan permodalan awal strategis, sementara akademisi mentransfer inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Di sisi lain, pendekatan menjamin berfokus pada akuntabilitas kinerja dan stabilitas pasar. Hal ini dapat dicapai melalui peran pemerintah sebagai integrator program lintas OPD, bisnis yang menjamin kepastian pasar melalui kontrak *off-taker*, dan akademisi yang menjamin kualitas luaran SDM yang berkelanjutan. Lembaga kawasan dan media secara kolektif menjamin transparansi publik. Kombinasi dua pendekatan ini vital untuk memastikan akselerasi pembangunan berjalan secara efisien dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka model kolaborasi multipihak untuk akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi (modifikasi dari Eweje *et al.* 2021)

Implementasi Model Penta Helix sebagai strategi akselerasi kawasan transmigrasi menuntut sinergi peran yang terukur dari lima pilar utama. Pilar komunitas bertindak sebagai subjek melalui lembaga ekonomi kawasan (BUMDesma/Koperasi Sekunder) yang berfungsi sebagai *single hub* untuk mengkonsolidasi unit produksi desa serta meningkatkan daya tawar kolektif petani. Peran ini didukung penuh oleh pilar pemerintah sebagai regulator dan katalis yang menyediakan kerangka hukum serta mengintegrasikan bantuan lintas sektor di bawah koordinasi Dinas Transmigrasi agar tepat sasaran. Di sisi hilir, pilar bisnis hadir sebagai mitra strategis yang menjamin stabilitas ekonomi melalui skema kemitraan kontrak (*off-taker*) dan investasi fasilitas pengolahan untuk memutus rantai tengkulak. Secara simultan, pilar akademisi menyuplai inovasi teknologi pascapanen dan standardisasi manajerial guna meningkatkan kapasitas SDM serta mutu produk. Seluruh ekosistem ini dikawal oleh pilar media yang berperan menjaga akuntabilitas tata kelola sekaligus mempromosikan produk unggulan kawasan untuk memperluas jangkauan pasar industri.

Kolaborasi kelembagaan multipihak dan partisipatif ini akan secara langsung menciptakan rantai nilai komoditas unggulan yang inklusif, mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru berbasis industrialisasi dan hilirisasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama Trans Karya Nusa. Namun, implementasi model ini menghadapi risiko strategis berupa potensi resistensi dari aktor pasar eksisting (tengkulak) dan risiko inefisiensi birokrasi dalam koordinasi lintas sektor. Selain itu, keterbatasan kompetensi manajerial pengelola lembaga di tingkat tapak dapat menghambat keberlanjutan operasional *hub*.

Sebagai strategi mitigasi, diperlukan penguatan legitimasi lembaga kawasan melalui regulasi yang tegas serta penerapan sistem *digital monitoring* untuk menjamin transparansi rantai pasok. Pendampingan profesional yang intensif dan pelibatan wirausaha sosial (*social entrepreneur*) menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan

kompetensi tersebut, sekaligus memastikan bahwa transformasi industri tetap berpihak pada kesejahteraan petani transmigrasi.

Kesimpulan

Pendekatan sektoral yang selama ini hanya berfokus pada penyaluran bantuan ke unit desa terbukti belum mampu mengatasi masalah struktural berupa fragmentasi kelembagaan dan ketiadaan koordinasi (*hub*) di tingkat tapak. Meskipun kerangka Trans Gotong Royong telah mengantisipasi hal ini, implementasi yang masih parsial dan keterbatasan SDM tetap membuat investasi pemerintah tidak efektif dan menghambat pencapaian skala ekonomi komoditas unggulan.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan fundamental dalam tata kelola kawasan. Fokus harus segera dialihkan pada pembentukan lembaga tapak kawasan sebagai *single hub* yang profesional, terlegitimasi, dan berbasis kolaborasi multipihak yang inklusif. Strategi ini merupakan jalan untuk menyinergikan sumber daya, memperkuat kapasitas SDM melalui peran wirausaha sosial dan pendamping profesional, serta memastikan keberlanjutan ekonomi kawasan.

Sebagai rekomendasi tindakan (*call to action*), pemerintah harus segera menerbitkan regulasi turunan Permentrans 8/2025 yang memandatkan pembentukan lembaga ekonomi kawasan sebagai entitas hukum tunggal di tingkat tapak. Selain itu, diperlukan pengalokasian anggaran strategis untuk program pendampingan kawasan yang intensif guna menjamin transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing industri.

Acknowledgement

Naskah kebijakan (policy brief) ini merupakan luaran dari hasil penelitian yang didukung oleh skema pendanaan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Temuan dalam riset ini menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang dipaparkan dalam dokumen ini.

Daftar Pustaka

- Adji MW, Yulianti S, Tresnaningrum S, Norrista EG. Transmigration as a Strategy for Strengthening National Food Security. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*. 2021 Apr 28;2(1):84-105.
- Arndt HW. 1983. Transmigration: Achievements, problems, prospects. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 19(3), pp.50-73.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/15/2bb49a0af17ec89ac16971de/luas-panen-dan-produksi-jagung-di-indonesia-2024.html> [diakses pada 20 Desember 2025].
- Eweje G, Sajjad A, Nath SD, Kobayashi K. 2021. Multi-stakeholder partnerships: A catalyst to achieve sustainable development goals. *Marketing Intelligence & Planning*, 39(2), pp.186-212.
- Higham I, Bäckstrand K, Fritzsche F, Koliev F. 2024. Multistakeholder partnerships for sustainable development: promises and pitfalls. *Annual Review of Environment and Resources*, 49
- Maryono M, Killoes AM, Adhikari R, Aziz AA. 2024. Agriculture development through multi-stakeholder partnerships in developing countries: A systematic literature review. *Agricultural Systems*, 213, p.103792.
- Pérez-Sainz JP. Transmigration and accumulation in Indonesia. In *State policies and internal migration 2022* Aug 30 (pp. 183-227). Routledge.
- Pratiwi A, Matous P, Martinus K. 2022. Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies*, 95, pp.391-401.
- Sudarsono FI, Dwimawanti IH, Fauziah L. Transpolitan: Development Strategy For The Pearl Transmigration Area. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2023 Nov 27;6(4):1030-43.
- Tirtosudarmo R. 2022. Transmigration and New Order's Development Plan. In *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia* (pp. 23-47). Singapore: Springer Singapore.
- United Nations. 2015. Partnership for Sustainable Development Goals: A Legacy Review towards Realizing the 2030 Agenda, available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/publication/partnerships-a-legacy-review> (diakses 10 November 2025).



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Suprehatin Suprehatin, merupakan dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Penulis tertarik pada penelitian mengenai food security and food systems, agrifood value chain, agrifood policy, sustainability and political economy. Saat ini penulis merupakan ketua Tim C Ekspedisi Patriot 2025 di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan kegiatan Kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dan IPB University.

(Corresponding Author)

Email: suprehatin@apps.ipb.ac.id



Rizha Nur Irawan, merupakan mahasiswa Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi, IPB University. Penulis tertarik dengan penelitian terkait pengembangan masyarakat pertanian dan produksi tanaman pangan. Saat ini penulis berperan aktif sebagai koordinator lapang Tim C Ekspedisi Patriot 2025 di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus meneliti kelembagaan ekonomi lokal.



Tsurayya Syifa'Azmir, merupakan alumni Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Penulis tertarik dengan penelitian terkait studi kelayakan usaha, supply chain, consumer behaviour, dan pemasaran agribisnis. Saat ini penulis berperan aktif sebagai anggota Tim C Ekspedisi Patriot 2025 di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus meneliti kelembagaan ekonomi lokal dan rantai nilai komoditas unggulan.



Senia Aprilia Putri Hasibuan, merupakan alumni Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Penulis tertarik dengan penelitian terkait studi kelayakan usaha, supply chain, consumer behaviour, dan pemasaran agribisnis. Saat ini penulis berperan aktif sebagai anggota Tim C Ekspedisi Patriot 2025 di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus meneliti kelembagaan ekonomi lokal dan rantai nilai komoditas unggulan.



Mahda Aryo Firdaus, merupakan mahasiswa Program Studi Teknologi dan Pengembangan Masyarakat, Sekolah Vokasi, IPB University. Penulis tertarik pada penelitian mengenai pengembangan masyarakat pertanian, dinamika politik yang berpengaruh pada dunia pertanian dan isu lingkungan. Saat ini penulis merupakan anggota Tim C Ekspedisi Patriot 2025 di Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandeu Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus meneliti kelembagaan ekonomi lokal.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680